

PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFISIENSI, RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO PERTUMBUHAN TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019-2024

Essa Anand Saputra¹, Nova Anggrainie²

Akuntansi, Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia

essa28052003@gmail.com, nova_a@staff.gunadarma.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of the Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio on Financial Distress in the regency and municipal governments of North Kalimantan Province during the 2019-2024 period. The research is motivated by the importance of measuring regional financial performance to anticipate the risk of financial distress, which can hinder the sustainability of regional development. This research applies a quantitative method using secondary data obtained from the Regional Government Financial Statements (LKPD). The study population consists of one municipal government and four regency governments in North Kalimantan Province, selected using a saturated sampling technique so that the entire population is included as the sample. Data analysis was carried out through multiple linear regression using SPSS, covering descriptive statistical analysis, classical assumption tests, F-tests, t-tests, and the coefficient of determination (R^2). The findings reveal that, simultaneously, the Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio significantly influence Financial Distress. Partially, only the Efficiency Ratio has a significant effect, while the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio have no significant effect. The coefficient of determination indicates that the four independent variables explain a substantial proportion of the variation in Financial Distress. The implications of this study suggest that regional governments should improve budget management efficiency, optimize locally generated revenue, and maintain stable revenue growth to minimize the risk of financial distress.

Keywords: *Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Growth Ratio, Financial Distress.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan terhadap *Financial Distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019-2024. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya mengukur kinerja keuangan daerah untuk mengantisipasi risiko kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dapat mengganggu kelangsungan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Populasi penelitian mencakup 1 pemerintah kota dan 4 pemerintah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, dengan teknik pengambilan sampel *saturated sampling* sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

berganda dengan bantuan SPSS, meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Secara parsial, hanya Rasio Efisiensi yang berpengaruh signifikan, sedangkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel independen mampu menjelaskan variasi *Financial Distress* secara cukup besar. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dan menjaga pertumbuhan pendapatan yang stabil untuk meminimalkan risiko *financial distress*.

Kata Kunci: rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, financial distress

1. Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memperkuat daya saing, mewujudkan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik melalui tata kelola administrasi yang lebih efisien. Penerapan sistem desentralisasi ini menggantikan model pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik, sekaligus disertai dengan pengalihan anggaran dari APBN ke APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Provinsi Kalimantan Utara adalah wilayah administratif termuda di Indonesia yang telah diresmikan secara sah dibentuk pada tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari Kalimantan Timur. Provinsi ini terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Utara memiliki daratan seluas kurang lebih 75.467,70 km² serta wilayah laut seluas 11.579 km². Provinsi ini terbagi atas lima daerah otonom, terdiri dari empat kabupaten-Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung-serta satu kota, yaitu Tarakan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 770.627 jiwa, dengan tingkat kepadatan yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah memiliki kedudukan penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan hak dan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang maupun aset yang dimiliki daerah. Tujuan utamanya adalah mendukung fungsi pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien, dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban fiskal. Proses pengelolaan ini sangat terkait dengan perencanaan serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun berdasarkan kebutuhan operasional dan kemampuan fiskal daerah. APBD memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai instrumen otorisasi dan perencanaan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan, alokasi sumber daya, distribusi keadilan sosial, serta penstabil ekonomi daerah.

Financial distress sering muncul akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta pertumbuhan keuangan yang tidak stabil. Rasio pertumbuhan pendapatan berperan penting dalam menilai kapasitas keuangan daerah, khususnya ketika kebutuhan belanja terus meningkat. Rasio pertumbuhan dengan nilai positif mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal secara efektif sekaligus menekan beban operasional. Kondisi tersebut menandakan adanya kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan investasi pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wulandari & Arza, 2020). Analisis rasio pertumbuhan menjadi instrumen vital dalam menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Utara dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat menjaga keberlanjutan fiskal serta meminimalkan risiko terjadinya *financial distress* melalui pemanfaatan indikator ini.

Penelitian ini berfokus pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2019-2024 dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko fiskal serta menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik secara mandiri. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Rendahnya rasio kemandirian fiskal, yakni sekitar $\leq 0,28$, mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih relatif kecil. Sebaliknya, tingkat ketergantungan fiskal yang mencapai lebih dari 74% menegaskan bahwa struktur keuangan daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Utara mencatat rasio efektivitas fiskal sebesar 101,23%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang ditetapkan. Meski demikian, pencapaian efektivitas tersebut tidak serta-merta mencerminkan kestabilan keuangan daerah, sebab masih terdapat fluktuasi antar tahun yang menggambarkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, aspek efisiensi dan pertumbuhan keuangan daerah juga perlu diperhatikan, karena keduanya menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya fiskal secara optimal, berkesinambungan, serta mendukung keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.

Tingkat ketergantungan fiskal yang masih tinggi, ketidakstabilan rasio efektivitas, serta efisiensi dan pertumbuhan fiskal yang belum menunjukkan kinerja optimal berpotensi memicu terjadinya *financial distress* atau tekanan keuangan pada pemerintah daerah. Situasi *financial distress* dalam sektor publik dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama karena berimplikasi langsung pada keberlangsungan pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan kondisi tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pengaruh rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dalam periode 2019-2024, agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan masukan bagi perumusan kebijakan keuangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kerja sama antara prinsipal sebagai pihak pemberi amanah atau kontrak dengan agen sebagai pihak penerima amanah, di mana

prinsipal menugaskan agen untuk bertindak demi kepentingannya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan tersebut, prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan yang diperlukan guna merealisasikan tujuan tersebut (Supriyono, 2021). Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan mandat, sedangkan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi otoritas untuk mengelola keuangan daerah serta menyediakan pelayanan publik yang optimal. Supriyono (2021) menegaskan bahwa inti dari teori agensi adalah adanya pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen, dengan tujuan menciptakan keselarasan antara kepentingan masyarakat sebagai pemberi mandat dan kinerja pemerintah daerah sebagai pelaksana mandat.

Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*)

Menurut Choi dan Park (2021), organisasi tidak beroperasi dalam ruang yang sepenuhnya otonom, melainkan berada dalam suatu sistem yang saling bergantung, di mana kelangsungan operasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengakses dan mengelola sumber daya dari aktor eksternal. Sumber daya tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, pendanaan, tenaga kerja, informasi, serta legitimasi sosial dan politik (Sari & Murtanto, 2024). Ketergantungan ini menciptakan dinamika kekuasaan antara organisasi dengan entitas yang menguasai sumber daya tersebut, sehingga semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin besar pula potensi ketidakstabilan yang dapat terjadi, khususnya ketika terjadi perubahan pada regulasi, intensitas persaingan pasar, atau kondisi ekonomi makro.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan keseluruhan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pemberian layanan kepada masyarakat, yang seluruhnya dapat diukur dengan satuan uang dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ruang lingkup keuangan daerah meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta aset daerah yang dikelola sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal yang tinggi melalui peningkatan PAD dapat membantu pemerintah daerah mengurangi risiko *financial distress*. Menurut Wulandari dan Arza (2020) menemukan adanya hubungan negatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *financial distress* pada pemerintah daerah di Sumatera Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress*. Hasil tersebut sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya, yang menekankan bahwa organisasi yang mampu menghasilkan sumber dayanya sendiri akan memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik. Beberapa penelitian lain memperlihatkan bahwa pengaruh PAD terhadap *financial distress* tidak selalu konsisten. Zakia dan Setiawan (2021), misalnya, menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap kondisi fiskal dapat bervariasi sesuai dengan karakteristik dan situasi masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya perlu berupaya meningkatkan PAD, tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang memengaruhi kondisi keuangan, seperti efisiensi pengeluaran serta pengelolaan belanja modal secara optimal.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu elemen pokok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merepresentasikan arah kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai beragam program maupun kegiatan pembangunan. Pengelolaan belanja yang tidak

efisien, terutama jika didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal, dapat meningkatkan risiko *financial distress*, yaitu kondisi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara berkelanjutan.

Menurut penelitian oleh Elfiyana dan Arza (2022), rasio efisiensi belanja yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja secara efektif, sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya *financial distress*. Sebaliknya, belanja yang tidak efisien dapat memperburuk kondisi keuangan daerah.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2023), metode kuantitatif berlandaskan paradigma positivistik yang menguji data melalui instrumen penelitian serta dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis. Pendekatan asosiatif bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sesuai tujuan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi yang digunakan mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara yang tercantum dalam situs resmi www.kaltara.bps.go.id tahun 2023, dengan total lima daerah, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode sampel jenuh, yaitu metode di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pemilihan teknik ini dilakukan karena jumlah populasi yang tersedia tergolong kecil, sehingga seluruh populasi yang terdiri dari 5 wilayah administratif (1 kota dan 4 kabupaten) digunakan sebagai sampel penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian (X1)	30	.02	.17	.0833	.04737
Rasio Efisiensi (X2)	30	.67	1.14	.9443	.09145
Rasio Efektivitas (X3)	30	.46	1.84	1.1747	.36876
Rasio Pertumbuhan (X4)	30	-.64	.66	.1167	.31901
Financial Distress (Y)	30	-.33	.14	-.0565	.09059
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil uji statistik deskriptif yang ditampilkan pada Tabel 4.2 memberikan gambaran mengenai seluruh variabel penelitian, yaitu Rasio Kemandirian (X1), Rasio Efisiensi (X2), Rasio Efektivitas (X3), Rasio Pertumbuhan (X4), dan *Financial Distress* (Y). Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik dasar data melalui ukuran-ukuran seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00885773
Most Extreme Differences	Absolute	.337
	Positive	.285
	Negative	-.337
Test Statistic		.337
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200 yang mana nilai tertera > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi klasik normalitas residual terpenuhi. Meskipun demikian, dalam banyak penelitian regresi dengan jumlah sampel lebih dari 30, dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian asumsi klasik berikutnya dan analisis regresi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Rasio Kemandirian (X1)	.864	1.157
	Rasio Efisiensi (X2)	.881	1.135
	Rasio Efektivitas (X3)	.589	1.698
	Rasio Pertumbuhan (X4)	.679	1.473
a. Dependent Variable: <i>Financial Distress</i> (Y)			

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4.4, diketahui bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu Rasio Kemandirian (X1), Rasio Efisiensi (X2), Rasio Efektivitas (X3),

dan Rasio Pertumbuhan PAD (X4), memiliki nilai tolerance yang berada di atas angka 0,10, yakni berturut-turut sebesar 0.864, 0.881, 0.589, dan 0.679, Selain itu, nilai VIF untuk keempat variabel juga berada jauh di bawah angka 10, yaitu masing-masing sebesar 1.157, 1.135, 1.698, dan 1.473. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. Artinya, tidak terdapat korelasi yang kuat antar variabel bebas, sehingga masing-masing variabel dapat dianalisis secara independen dan layak digunakan secara bersamaan dalam model regresi berganda. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi salah satu asumsi klasik yang penting untuk mendapatkan hasil estimasi yang valid dan reliabel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-.981	.019		-51.662
	Rasio Kemandirian (X1)	-.023	.035	-.012	-.666
	Rasio Efisiensi (X2)	.986	.018	.995	55.037
	Rasio Efektivitas (X3)	-.004	.005	-.016	-.708
	Rasio Pertumbuhan (X4)	.003	.006	.009	.456

a. Dependent Variable: *Financial Distress (Y)*

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser, diketahui bahwa sebagian besar variabel bebas tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel Rasio Kemandirian (0.511), Rasio Efektivitas (0.485), dan Rasio Pertumbuhan PAD (0.652) yang semuanya lebih besar dari 0.05. Namun demikian, variabel Rasio Efisiensi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 (< 0.05), yang mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi secara umum bebas dari heteroskedastisitas, meskipun perlu perhatian terhadap variabel Rasio Efisiensi.

Uji Korelasi

Gambar 1. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00184
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	15
Total Cases	30
Number of Runs	15
Z	-.186
Asymp. Sig. (2-tailed)	.853
a. Median	

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan metode Runs Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.853 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, residual dari model regresi menyebar secara acak, dan asumsi klasik bebas autokorelasi telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.981	.019		-51.662	.000
	Rasio Kemandirian (X1)	-.023	.035	-.012	-.666	.511
	Rasio Efisiensi (X2)	.986	.018	.995	55.037	.000
	Rasio Efektivitas (X3)	-.004	.005	-.016	-.708	.485
	Rasio Pertumbuhan (X4)	.003	.006	.009	.456	.652

a. Dependent Variable: Financial Distress (Y)

a. Dependent Variable: Financial Distress (Y)

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

$$Y = -0.981 - 0.023X_1 + 0.986X_2 - 0.004X_3 + 0.003X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Financial distress

α : Konstanta

X₁ : Rasio Kemandirian

X₂ : Rasio Efisiensi

X₃ : Rasio Efektivitas

X₄ : Rasio Pertumbuhan

B₁, B₂, B₃, B₄ : Koefisien Regresi

e : Standard of Error

Berdasarkan persamaan regresi, dapat dijelaskan:

1. Konstanta (-0,981): menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel independen, financial distress cenderung negatif, artinya daerah relatif sehat secara fiskal.
2. Rasio Kemandirian (X1, -0,023): berpengaruh negatif, namun tidak signifikan dalam menjelaskan financial distress.
3. Rasio Efisiensi (X2, 0,986): berpengaruh positif dan besar, menunjukkan efisiensi anggaran berkontribusi utama terhadap tekanan fiskal.
4. Rasio Efektivitas (X3, -0,004): berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.
5. Rasio Pertumbuhan (X4, 0,003): berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap financial distress.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.993	.992	.00828
a. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan (X4), Rasio Efisiensi (X2), Rasio Kemandirian (X1), Rasio Efektivitas (X3)				

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.992 menunjukkan bahwa 99,2% variasi *Financial Distress* dapat dijelaskan oleh variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan, sedangkan sisanya sebesar 0,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.992 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tetap kuat dan akurat meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas. Selain itu, nilai R sebesar 0.996 mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan dependen, serta nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 0.00828 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang sangat kecil, sehingga model ini dapat dikatakan sangat baik dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap *Financial Distress*.

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.981	.019		-51.662	.000
	Rasio Kemandirian (X1)	-.023	.035	-.012	-.666	.511
	Rasio Efisiensi (X2)	.986	.018	.995	55.037	.000
	Rasio Efektivitas (X3)	-.004	.005	-.016	-.708	.485
	Rasio Pertumbuhan (X4)	.003	.006	.009	.456	.652
a. Dependent Variable: <i>Financial Distress</i> (Y)						

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji parsial t, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Nilai t_{hitung} untuk X1 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.511 (> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti variabel rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.
2. Variabel rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Nilai t_{hitung} untuk X2 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 (< 0.05) maka dapat

disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti variabel rasio efisiensi berpengaruh terhadap *financial distress*.

3. Variabel rasio efektivitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Nilai t_{hitung} untuk X3 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.485 (> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti variabel rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

4. Variabel rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Nilai t_{hitung} untuk X4 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.652 (> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, yang berarti variabel rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.236	4	.059	862.023	.000 ^b
	Residual	.002	25	.000		
	Total	.238	29			
a. Dependent Variable: <i>Financial Distress</i> (Y)						
b. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan (X4), Rasio Efisiensi (X2), Rasio Kemandirian (X1), Rasio Efektivitas (X3)						

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari *level of significant* yang telah ditentukan yaitu sebesar 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan hasil uji parsial pada rasio kemandirian (X1) menunjukkan nilai *unstandardized coefficients* B sebesar -0.023 dan nilai signifikansi sebesar 0.511, dengan nilai signifikansi > 0.05 , dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019-2024, sehingga H_1 yang menyatakan rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dapat ditolak. Nilai koefisien regresi rasio kemandirian bernilai negatif menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki hubungan dengan *financial distress*.

Rasio kemandirian daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik tanpa ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan kemandirian tinggi mengandalkan pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur. Kemandirian yang tinggi menunjukkan risiko *financial distress* yang rendah. Sebaliknya, rendahnya tingkat kemandirian menjadi indikator potensi *financial distress* karena ketergantungan besar terhadap transfer dana pusat menjadikan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional yang memengaruhi penerimaan anggaran. Penurunan dana

transfer atau perubahan alokasi dari pusat menyebabkan daerah dengan kemandirian rendah mengalami kesulitan dalam pendanaan belanja.

Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan hasil uji parsial pada rasio efisiensi (X2) menunjukkan nilai *unstandardized coefficients* B sebesar 0.986 dan nilai signifikansi sebesar 0.000, dengan nilai signifikansi < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019-2024, sehingga H_2 yang menyatakan rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap *financial distress* dapat diterima. Nilai koefisien regresi rasio efisiensi yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan yang searah dengan *financial distress*.

Rasio efisiensi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil yang optimal. Semakin tinggi rasio efisiensi suatu daerah, semakin tinggi pula kecenderungan pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan alokasi sumber daya yang tidak optimal yang dapat menghambat efektivitas pengeluaran daerah. Sebaliknya, pengelolaan yang lebih efisien memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan manfaat dari setiap pengeluaran yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko terjadinya *financial distress* akibat kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan hasil uji parsial pada rasio efektivitas (X3) menunjukkan nilai *unstandardized coefficients* B sebesar -0.004 dan nilai signifikansi sebesar 0.485, dengan nilai signifikansi > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, H_3 yang menyatakan rasio efektivitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ditolak. Penelitian yang dilakukan di provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa rasio efektivitas bukan merupakan faktor yang mempengaruhi *financial distress*.

Meskipun realisasi PAD mencapai target yang ditetapkan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan hanya mencapai 7.6%, sehingga keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketika sebagian besar pendapatan daerah berasal dari transfer, peningkatan efektivitas PAD tidak serta-merta memperbaiki kondisi keuangan daerah atau mengurangi risiko *financial distress*.

Pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan hasil uji parsial pada rasio pertumbuhan (X4) menunjukkan nilai *unstandardized coefficients* B sebesar 0.003 dan nilai signifikansi sebesar 0.652, Dengan nilai signifikansi > 0.05 , dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019-2024, sehingga H_4 yang menyatakan rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap *financial distress* ditolak. Penelitian yang dilakukan di provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi *financial distress*.

Meskipun pertumbuhan PAD terus meningkat, sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal. Data yang menunjukkan bahwa belanja modal hanya mencapai 27% dari total belanja APBD, masih berada di bawah standar minimal yang ditetapkan sebesar 40%. Ketidakseimbangan ini menyebabkan daerah tidak dapat secara optimal memanfaatkan pertumbuhan PAD untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan pembangunan

infrastruktur. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan PAD meningkat, risiko *financial distress* tetap ada jika anggaran tidak dialokasikan secara optimal untuk belanja produktif.

Pengaruh Rasio Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan terhadap *Financial Distress*

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.000 maka dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima sehingga rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas dan pertumbuhan berpengaruh terhadap tax avoidance. Besarnya pengaruh keempat variabel terhadap *financial distress* sebesar 0.993 atau 99.3% variasi *Financial Distress* dapat dijelaskan oleh variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan, sedangkan sisanya sebesar 0,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh Dominan Variabel Independen

Berdasarkan hasil uji t dan koefisien Beta Standar, variabel Rasio Efisiensi (X_2) ialah variabel yang paling dominan dalam memengaruhi *Financial Distress*. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien Beta Standar absolutnya yang paling tinggi 0.995 di antara semua variabel independen, dan juga terdukung melalui nilai signifikansinya 0.000 yang memperlihatkan bahwasanya pengaruhnya tersebut signifikan secara statistik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini yang menelaah pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan terhadap *Financial Distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2019-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi memiliki pengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*, sedangkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan tidak terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi dalam pengelolaan anggaran memegang peranan lebih penting dalam mengurangi potensi terjadinya *Financial Distress*.
2. Secara simultan, keempat variabel independen yang diuji terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Dengan demikian, kemandirian fiskal, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, efektivitas pencapaian target pendapatan, serta pertumbuhan pendapatan daerah secara kolektif memiliki peran dalam menentukan tingkat *Financial Distress* pada pemerintah daerah.
3. Analisis deskriptif memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah masih tergolong rendah, meskipun capaian efektivitas pendapatan relatif baik. Akan tetapi, fluktuasi pertumbuhan pendapatan, termasuk kecenderungan negatif pada beberapa periode, berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, R. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- [2] Arifin, M. (2023). *Keuangan Daerah dan Otonomi Fiskal*. Bandung: Fokus Media.
- [3] Choi, S., & Park, H. (2021). Resource Dependence and Organizational Power: A Structural Analysis. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(2), 205-220.
- [4] DJPB Kemenkeu. (2024). *Laporan Kinerja dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.
- [5] Elfiyana, N., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(1), 45-60.
- [6] Fadilah, N. (2022). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 45-56.

[7] Fatmawati, L., & Wardhaningrum, F. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Financial Distress pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 11(1), 45-57.

[8] Handoko, T. H. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

[9] Illahi, M. F., Wardhani, R., & Purnamasari, Y. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Financial Distress pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 33-45.

[10] Kukuh, H., Wulandari, I. N., & Andriyani, A. D. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 14(1), 1-10.

[11] Lailiyah, N., & Desitama, R. (2023). Rasio Keuangan dan Dampaknya terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 101-115.

[12] Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[13] Puspitasari, R., & Wulandari, F. (2022). Analisis Rasio Keuangan terhadap Financial Distress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 89-101.

[14] Sari, M., & Arza, F. I. (2021). Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Financial Distress pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 101-115.

[15] Supriyono. (2020). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga.